

BPD DIY MITRA BPKH PENANGANAN COVID-19

# Salurkan Bantuan Kemaslahatan Umat

**YOGYA (KR)** - Untuk membantu penanganan Covid-19 di Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerjasama dengan Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan kemaslahatan umat dalam penanganan Covid-19 untuk DIY, Selasa (21/7). Tak hanya menyoal masyarakat yang terdampak Covid-19, bantuan ini juga disalurkan kepada sekolah, pondok pesantren hingga bantuan tunai bagi ustadz dan masjid-masjid yang ada di DIY.

Wakil Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menjelaskan, bantuan kemaslahatan umat yang disalurkan dalam setahun sebesar Rp 185 miliar. Untuk wilayah DIY yang disalurkan berupa 1.750 paket sembako, 2.000 Alat Pelindung Diri (APD) untuk Rumah Sakit, sapi kurban, bantuan untuk sekolah dan pondok pesantren. Hingga bantuan tunai us-

tadz dan bantuan masjid. "Bantuan dari BPKH ini ada yang sudah disalurkan dan masih tahap penyaluran. Bantuan ini diberikan juga kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia," terang Ihsan Yunus saat acara penyerahan bantuan di gedung pusat Bank BPD DIY, Yogya, Selasa (21/7).

Ihsan Yunus berharap, gerakan dari BPKH ini bisa menginspirasi instansi atau pihak lain untuk melakukan aksi serupa dalam penanganan Covid-19. Saat awal pandemi Covid-19 ada di Indonesia, BPKH juga langsung menyalurkan bantuan sebesar Rp 50 miliar.

"Melalui bantuan ini bisa membantu umat dan punya triple effect. Sehingga badan, kementerian atau pemerintah daerah lainnya turut berpartisipasi dalam penanganan Covid-19," tandas Ihsan Yunus.

Direktur Utama PT Bank BPD

DIY, Santoso Rohmad menerangkan, Bank BPD DIY sebagai mitra BPKH. Sinergi antara Bank BPD DIY dengan BPKH sudah terjalin sejak lama. Bahkan saat Bank BPD DIY masih berstatus bank buku satu. Meski sempat berhenti, namun kerjasama dengan BPKH kembali terjalin setelah berstatus bank buku dua. "Sebagai mitra BPKH, Bank BPD DIY sebagai bank penerima setoran haji dari masyarakat sejak 2018.

Bank BPD juga memegang pasar terbesar untuk tabungan haji. Selama tahun 2019 sudah ada 707 orang yang melunasi. Sedangkan hingga bulan Juni 2020 sudah ada 316 orang yang melunasi. "Bank BPD DIY memegang pasar terbesar untuk masyarakat yang mau berangkat haji. Nah ini akan kita kejar lagi karena kemarin sempat terhenti," tandas Santoso Rohmad.

(Aha)-f

**IDI:** ..... **Sambungan hal 1**

"Warga jangan sampai lengah dengan predikat DIY terbaik, lalu longgar terapkan protokol. Penularan utama Covid-19 itu kan dari mulut

dan hidung, maka bagian itu harus ditutup pakai masker. Pemberian sanksi perlu untuk memaksa warga pakai masker. Awalnya memang

harus dipaksa dulu, nanti lama kelamaan akan menjadi kebiasaan," pungkas Joko.

(Dev)-d

**DIY** ..... **Sambungan hal 1**

Sementara dari bidang penegakan hukum akan dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Bantul terkait kepatuhan pada protokol kesehatan dengan disertai sanksi agar masyarakat tertib.

"Kata kuncinya kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan diperketat. Jaga jarak, mengenakan masker sesering mungkin melakukan cuci tangan," Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja SKM, M Kes, Selasa (21/7). *Berita terkait di halaman 3.*

Dijelaskan, dalam mencegah penyebaran Covid-19 antara pemerintah dan masyarakat harus bersatu. Saling memberikan suport dan menjalankan semua aktivitas sesuai protokol kesehatan.

Sementara itu delapan mantan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) KPU Bantul dinyatakan positif Covid-19. Mantan PPDP yang dinyatakan positif berasal dari dua desa di Sewon.

Camat Sewon Danang Irwanto tidak menampik ada delapan mantan PPDP dinyatakan positif Covid-19 dan hasilnya keluar hari ini. Mereka sebelum menjalankan tugas menjalani rapid test, yang reaktif menjalani uji

swab. "Saya baru tahu pagi tadi, ternyata terdapat delapan mantan PPDP dinyatakan positif Covid-19,"ujarnya. Meski begitu, yang dinyatakan positif saat ini telah diganti dengan PPDP lainnya. Sehingga proses lanjutan PPDP tidak terganggu. Penambahan kasus positif Covid-19 dari mantan PPDP diprediksi bakal bertambah. Karena masih ada desa lain yang mantan PPDP baru uji swab dan belum keluar hasilnya. Dengan tambahan delapan pasien positif Covid-19, maka jumlah pasien positif Corona di Kecamatan Sewon menjadi 12 orang.

Lurah Desa Bangunharjo Sewon Bantul, Yuni Ardi Wibowo SE mengatakan, warga yang kontak erat dengan nakes yang bekerja di Puskesmas Sewon 2 sudah menjalani isolasi mandiri sejak dilakukan swab. Karena 17 orang yang menjalani uji swab. Menurutnya, dokter di Puskesmas Sewon 2 merupakan dokter umum. Diduga kuat, penularan terjadi ketika menangani pasien di Puskesmas.

Kenaikan jumlah kasus positif yang terjadi di DIY dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurut Sultan, ke-

naikan atau lonjakan kasus yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti penguatan tracing lewat swab massal yang digencarkan, mulai dibukanya aktivitas ekonomi, adanya anggota masyarakat yang pergi ke luar DIY dan pulang membawa Covid-19.

"Kalau soal lonjakan kasus bisa dipengaruhi banyak faktor. Seperti swab massal yang digencarkan, perilaku masyarakat terkait protokol kesehatan sampai orang bepergian keluar daerah dan pulang membawa Covid-19,"kata Sri Sultan HB X.

Gubernur DIY itu menambahkan, adanya penguatan tracing serta deteksi awal melalui swab yang sudah berjalan di wilayah DIY. Pihaknya berharap kasus transmisi lokal yang akhir-akhir ini mendominasi kasus baru dapat ditekan.

"Untuk menekan kasus semua harus proaktif. Harapan saya antar tetangga, antarwarga, jangan sampai terjadi penularan terjadi dulu. Jadi kalau mau kasusnya mereda, ya *gelem* (mau) tinggal di rumah dulu biar sehat. Karena kalau pergi-pergi risikonya besar. Kalau keluar dari Yogya dan pergi ke zona merah risikonya pasti besar," terang Sultan. (Ria/Ira/Roy)-d

**Uji** ..... **Sambungan hal 1**

merupakan tahap paling penting dan sudah tahapan lanjut. "Artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut. Karena ada preklinik sudah dilewati, Fase I, Fase II sudah dilewati, sekarang Fase III," imbuh Kepala BPOM.

Penny menyampaikan, BPOM menjamin protokol dari uji klinis ini adalah valid, kemudian nanti BPOM akan mendampingi proses uji klinis ini, sehingga ada percepatan pada saat ada pemberian izin edarnya. "Secara paralel juga proses produksi yang akan dilakukan oleh Bio Farma sudah akan kami dampingi, dikaitkan dengan fasilitasnya, sehingga memang nanti pada saat uji klinis selesai kami memberikan izin edar, segera bisa kita sudah edarkan/distribusikan," tambah Kepala BPOM.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan

Agus Putranto menyampaikan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan personel untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarnya. "Itu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Keuangan terutama dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diridloi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Menkes.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basvir menyatakan, Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik. Sampai saat ini Bio Farma sudah menyiapkan 100 juta dosis pertahun dan akan expand menuju 250 juta dosis pertahun.

"Tapi untuk tahap pertama, sesuai target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar kami sudah menargetkan untuk

bisa selesai sekitar 40 juta dosis pertahun," jelas Honesti Basvir.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kerja keras Pemerintah tidak ada artinya kalau masyarakat tidak membantu karena vaksin baru bisa beredar di awal tahun depan. "Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat, sebagaimana sudah disampaikan Menteri Kesehatan sejak awal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker," imbuh Menteri BUMN.

Erick memastikan, vaksin ini akan ada, tapi masyarakat dimohon tetap disiplin supaya Pemerintah bisa terus mengantisipasi. Bio Farma, menurut Erick, juga akan memastikan memproduksi obat untuk terapi kesembuhan, karena kalau ditanya obatnya pasti belum ada. (Sim)-d

**PJJ** ..... **Sambungan hal 1**

Apakah perbedaan antara Pendidikan Jarak Jauh pada pendidikan tinggi dan Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ yang kita bicarakan? Bedanya, PJJ yang kita bicarakan ini muncul setelah era Pandemi Covid-19 hadir. Sementara Pendidikan Jarak Jauh pada pendidikan tinggi sudah muncul jauh hari sebelum era Pandemi Covid-19 muncul. Meski berbeda tetapi banyak kesamaannya.

Pada 24 Desember 2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak jauh pada Pendidikan Tinggi.

Dalam Pasal 1 Butir 1 Permendikbud tersebut secara eksplisit disebutkan Pendidikan Jarak Jauh adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Semen-tara itu pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan Pendidikan Jarak Jauh memiliki karakteristik antara lain belajar mandiri, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta menggu-

nakan teknologi pendidikan lainnya. Dalam batas-batas pengertian dan karakteristik tersebut sesungguhnya PJJ yang dikembangkan pemerintah sekarang ini sama dengan Pendidikan Jarak Jauh pada pendidikan tinggi yang sudah lama dijalankan.

Apakah artinya itu? Artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan pihak sekolah sebagai penyelenggara PJJ dapat belajar dari lembaga pendidikan tinggi yang sudah menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh. Dalam realitasnya penyelenggaraan pembelajaran daring selama ini banyak sekali kendalanya. Kalau kita ingin program PJJ dijalankan dengan berhasil maka mau tidak mau kendala pembelajaran daring tersebut harus diatasi.

Karena PJJ sudah menjadi keputusan pemerintah maka untuk mendapatkan hasil optimal pemerintah berkewajiban memberi arahan, bimbingan dan fasilitasi penyelenggaraan PJJ. Sekarang ini setidaknya ada tiga hal yang perlu segera dilakukan pihak pemerintah, baik

Kemdikbud di tingkat pusat maupun dinas pendidikan di tingkat daerah.

Pertama, memberi arahan kepada pimpinan sekolah tentang bagaimana program PJJ dapat dilakukan secara produktif. Hampir semua sekolah sudah memiliki pengalaman tentang pengembangan program konvensional alias non-PJJ, tetapi miskin pengalaman tentang pengembangan program PJJ. Di sinilah arahan pemerintah sangat diperlukan.

Kedua, memberi bimbingan kepada para guru mengenai model pembelajaran yang efektif dilakukan menurut situasinya masing-masing. Ketiga, memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya siswa dan guru agar dapat mengakses informasi melalui media daring dengan mudah. Misalnya memperluas jaringan agar sinyal komunikasi bisa mendekat ke rumah-rumah guru dan siswa.

Dengan dilakukannya tiga perlakuan pemerintah tersebut diharapkan PJJ dapat berjalan secara produktif. (Penulis adalah Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta serta aktifis PJJ SMP Terbuka dan Siaran Radio Pendidikan (SRP))-d

PROF NIZAM KINI DIRJEN DIKTI

# Dr Sarjilah, Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya

**SLEMEN (KR)** - Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengajak berpikir kreatif dan bertindak inovatif dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Cara-cara lama tidak bisa dipakai lagi dan harus ditinggalkan dalam menghadapi tantangan baru. Tantangan yang kian berat dan tidak pernah dihadapi pada generasi sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Mendikbud di depan 29 pejabat baru di lingkungan Kemendikbud sesuai dilantik secara virtual, Selasa (21/7). Sejumlah pejabat yang dilantik yakni Dr Dra Sarjilah MPd yang semula menjabat Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPTK) Seni dan Budaya menjadi Kepala Balai Besar Pengembangan Penjamin-



KR-Janu Riyanto

**Dr Sarjilah MPd dilantik oleh Mendikbud Nadiem Makarim secara virtual.**

an Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya Yogyakarta.

Pejabat lain yang dilantik yakni Dekan Fakultas Teknik (FT) UGM Prof Ir Nizam MSc PhD sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Dr Chatarina Muliana SH SE MH sebagai Inspektur Jenderal dan Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Jumeri STP MSi sebagai Dirjen Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden Joko Widodo tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kemendikbud, dilanjutkan pengucapan sumpah dipandu Mendikbud. (Jan/Ati)-d

CITILINK PINDAH TERMINAL 3 SOETTA

# Penerbangan Berangsur Pulih

**JAKARTA (KR)** - Kondisi Lalu lintas penerbangan berangsur pulih di bandara-bandara di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura (AP) II, termasuk di pintu gerbang utama Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Cengkareng, Banten. Pada bulan ini, rata-rata jumlah penerbangan di Soekarno-Hatta berkisar 400-430 penerbangan/ hari atau meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya sekitar 200 penerbangan/hari.

"Jumlah traffic ini memang masih jauh dari angka di periode normal sebelum pandemi Covid-19, namun dalam beberapa waktu terakhir tren lalu lintas penerbangan semakin menguat," ujar Director of Operation & Service PT AP II Muhamad Wasid di Jakarta, Selasa (21/7).

Muhamad Wasid mengatakan, meningkatnya lalu lintas penerbangan dan meningkatnya utilisasi slot time juga diikuti peningkatan utilisasi kapasitas penumpang di

Terminal 2 Soetta. "Di tengah Covid-19 ini Soekarno-Hatta beroperasi dengan Terminal 2 dan Terminal 3. Pada bulan ini, lalu lintas penerbangan mulai berangsur pulih dan Terminal 2 melayani hingga 70 persen total penumpang di Soekarno-Hatta, sementara 30 persen dilayani melalui Terminal 3," jelasnya.

Muhamad Wasid menuturkan, penyeimbangan utilisasi kapasitas terminal itu dilakukan dengan memindahkan penerbangan Citilink dari Terminal 2D ke Terminal 3. Selanjutnya, sebagian penerbangan di Terminal 2E ke 2D mulai 23 Juli 2020.

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi mengatakan, mulai 23 Juli 2020 seluruh penumpang Citilink akan memproses keberangkatan dan ketibaan di Terminal 3 Soetta. "Koordinasi dan persiapan telah dilakukan PT AP II dan Citilink agar perpindahan operasional ke Terminal 3 mulai 23 Juli 2020 berjalan lancar," katanya. (Imd)-f

**Tanggap** ..... **Sambungan hal 1**

di Kompleks Kepatihan, Selasa (21/7).

Sedang saat dimintai tanggapan soal status tanggap darurat yang masih diberlakukan di DIY sampai 31 Juli mendatang. Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengisyaratkan akan memperpanjang status tanggap darurat di DIY apabila pertumbuhan kasus Covid-19 masih terjadi (tinggi). Status tanggap darurat tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19. Pihaknya khawatir apabila status tanggap darurat diakhiri, penanganan kesehatan akan teralau lama karena harus menggunakan mekanisme lelang.

"Kalau status ini dicabut maka setiap pendaan untuk kesehatan harus melalui lelang. Selama kita masih ada yang kena Covid-19 di rumah sakit ya dalam keadaan darurat, kemungkinan akan tetap saya lakukan. *Mosok* masih ada yang sakit dan harus diobati, bilang 'nantu dulu ya tunggu, tunggu saya lelang dulu' kan ndak mungkin," ungkap Sultan.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan pihaknya akan menyesuaikan pe-

rubahan nama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menjadi Satuan Tugas (Satgas) menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. Namun yang perlu digaris bawahi Presiden Jokowi ingin memfokuskan konsentrasi Satgas tersebut yaitu Satgas Pemulihan Ekonomi dan Satgas Pemulihan Non Ekonomi. "Saya kira Satgas Pemulihan Ekonomi itu sangat penting, Pak Gubernur sudah mulai mengkonsentrasikan pada pemulihan ekonomi, walaupun kita tidak boleh lengah dari sisi kesehatan. Kita pada posisi menunggu arahan Perpres tersebut saat ini untuk penyesuaian di daerah," tutur Baskara Aji.

Baskara Aji menjelaskan dalam Perpres tersebut disebutkan selama belum ada Satgas yang baru maka Gugus Tugas tetap berjalan seperti biasa. Namun dari sisi konsentrasi, salah satu bagian dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY adalah bidang ekonomi sehingga tidak akan banyak perubahan hanya tinggal arah konsentrasi Belanja Tak Terduga (BTT)-nya. (Ria/Ira)-f

**Hilal** ..... **Sambungan hal 1**

Sidang isbat ini diikuti melalui video konferensi para pimpinan ormas Islam, para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN/IAIN, Ketua LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), perwakilan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), BOSCHA ITB (Institut Teknologi Bandung) serta BIG (Badan Informasi Geospasial) dari Planetarium Jakarta.

Menag mengatakan, dalam melaksanakan sidang isbat Kemenag selalu menggunakan dua metode, yaitu hisab dan rukyat. Menurutnya, hisab dan rukyat, bukanlah dua hal yang untuk diberhadapkan atau saling dibenturkan. "Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain," jelasnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim melaporkan, dari 84 titik pengamatan rukyat tersebut, terdapat sejumlah petugas dari lima daerah yang telah melihat hilal dan disumpah atas kesaksiannya. Adapun nama petugas yang dilaporkan Agus Salim dalam sidang isbat telah memberikan kesaksian melihat hilal adalah Rudin ST (47) dan Nanda Dewi Pamungkas Sivi

(23), ASN BMKG Kupang NTT. Keduanya melihat hilal dan disumpah Ketua Pengadilan Agama Kupang Rasyid Muzhar. Kemudian, Inwanuddin (42), Khoiril Amin (56) dan Solahuddin Kamil (52), semuanya dari Tim Lembaga PCNU Gresik, melihat hilal dan disumpah Hakim Pengadilan Agama Gresik Muchidin

Selain itu, juga ada Kasdikin bin Markilan (48), Ali Mahfud bin Husen (42), dan M Kamaluddin bin Munadi (36), ketiganya ASN dan

BHR Tuban Jatim, menyatakan melihat hilal dan telah disumpah Hakim Pengadilan Agama Jatim Irwandi.

Nama saksi lainnya adalah Junaidi (43) dosen Ponorogo Jatim dan Sunanil Huda (38) Humas Kankemeng Ponorogo, keduanya melihat hilal dan telah disumpah Kiai Safrudin. KH Yahya (50), Pimpinan Pesantren Darul Hikam menyatakan melihat hilal dan telah disumpah Hakim Pengadilan Agama Kab Sukabumi, Zaenal Abidin. (Ati/Feb)-f



Prakiraan Cuaca		Rabu, 22 Juli 2020				
Lokasi	Pagl	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-31	50-90
Sleman					23-31	60-90
Wates					23-31	50-90
Wonosari					23-31	55-90
Yogyakarta					23-31	55-90